



## Hasil Studi Biaya Pangan

Maret 2017

## Ringkasan Eksekutif

### Latar Belakang dan Tujuan Studi

Badan Pangan Dunia (World Food Programme-WFP) telah diminta oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk memberikan bantuan teknis dalam melaksanakan Studi Biaya Pangan (*Cost of Diet Study*) pada kuartal ke-1 2017. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mendesain program transformasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bertujuan untuk menyediakan pangan yang lebih seimbang dan bergizi untuk masyarakat kurang mampu. Tujuan utama dari studi ini adalah:

1. Mengevaluasi bahan-bahan makanan yang tersedia di pasar lokal dapat memenuhi kebutuhan gizi makro dan mikro rumah tangga, khususnya mereka yang termasuk kelompok rentan masalah gizi seperti anak dibawah dua tahun (baduta), ibu hamil dan menyusui.
2. Memperkirakan biaya termurah dari kombinasi makanan yang tersedia secara lokal, termasuk bahan pangan pokok (beras), yang dapat memenuhi kebutuhan gizi semua anggota rumah tangga, yang dapat direpresentasikan secara rata-rata komposisinya terdiri dari seorang anak usia 12-23 bulan, seorang ibu menyusui, seorang laki-laki dewasa dan seorang remaja putri.
3. Memperkirakan proporsi rumah tangga yang mampu membeli diet bergizi yang tersedia secara lokal dan termurah, berdasarkan pada jumlah pengeluaran bulanan rumah tangga mereka untuk membeli bahan makanan.
4. Mengukur seberapa jauh ketidaktersediaan makanan bergizi dan/atau ketidak-mampuan untuk membeli makanan tersebut membatasi masyarakat dalam mendapatkan diet bergizi.
5. Memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan desain program BPNT agar dapat meningkatkan akses atau ketersediaan terhadap diet bergizi melalui:
  - a. Identifikasi jenis bahan makanan yang tersedia secara lokal yang dapat dimasukkan dalam paket makanan setara dengan nilai voucher Rp. 110.000 untuk memenuhi angka kecukupan gizi yang dianjurkan (Angka Kecukupan Gizi-AGK) dengan cara paling efektif (di sebut Paket Bergizi).
  - b. Memperkirakan berapa persentase AGK yang akan terpenuhi dari Paket Bergizi dan membandingkan dengan paket bantuan yang telah ada seperti: beras bersubsidi Rastra, Paket BPNT berupa beras dan gula serta Paket BPNT berupa beras dan telur.
  - c. Memperkirakan potensi dampak dari nilai voucher BPNT bila dinaikan menjadi Rp. 165.000 dan Rp. 220.000 terhadap jumlah dan kualitas gizi bahan makanan yang disertakan dalam paket makanan lokal yang telah ditentukan.

### Metode

Untuk menghitung harga per 100 gr dari makanan segar yang tersedia secara lokal, dilakukan perhitungan dengan menggunakan data rata-rata anggota rumah tangga dan total pengeluaran bulanan rumah tangga yang bersumber dari SUSENAS Maret 2016. Data tersebut kemudian di-ekstrapolasi untuk mendapatkan data agregat pada tingkat nasional dan untuk delapan provinsi terpilih sebagaimana telah disepakati

bersama melalui konsultasi dengan BAPPENAS. Delapan provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Sulawesi Selatan.

Pangan Bergizi yang tersesuaikan Makanan Pokok (PGMP)<sup>1</sup> dihitung untuk sebuah rumah tangga yang terdiri dari empat orang dengan komposisi sebagai berikut: anak usia 12-23 bulan, remaja putri usia 15-16 tahun, seorang ibu usia 30-59 tahun dengan berat badan 55 Kg dengan aktivitas tingkat sedang dan sedang menyusui serta seorang pria usia 30-59 tahun dengan berat badan 62 Kg dengan aktivitas tingkat sedang. Untuk menghitung keterjangkauan atau daya beli terhadap PGMP ini maka biaya bulanan dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran bulanan rumah tangga untuk membeli bahan makanan.

Untuk makanan fortifikasi, kandungan gizi dan harga per 100 gram dikumpulkan melalui data primer dari survei pasar di tiga pasar serta Indomaret dan Alfamart (jika ada) di satu kabupaten pada tiap provinsi terpilih. Lebih dari 200 makanan fortifikasi dari lima kelompok bahan makanan ditemukan selama survei pasar; 18 bahan makanan dipilih dari masing-masing kabupaten berdasarkan ketersediaan, kandungan gizi dan harga dan dimasukkan dalam PGMP.

Enam skenario dimodelkan untuk memberikan analisa secara rinci dari potensi dampak terhadap biaya dan daya beli terhadap PGMP: beras bersubsidi Rastra, Paket BPNT (Rp. 110.000) berupa beras dan gula dan paket berupa beras dan telur, Paket Bergizi senilai Rp. 110.000, Paket Bergizi senilai Rp. 165.000 dan Paket Bergizi senilai Rp. 220.000.

Temuan Utama dan Rekomendasi:

1. Konsumsi diet bergizi dapat dilakukan dengan menggunakan bahan makanan yang tersedia di pasar lokal. Beras, telur, tahu, ikan, sayuran hijau, tepung terigu serta minyak fortifikasi telah diidentifikasi sebagai bahan makanan yang tidak mahal tapi kaya zat gizi.
2. PGMP untuk rata-rata rumah tangga yang terdiri dari empat orang memerlukan biaya sebesar Rp. 1.191.883 per bulan. Harga termahal untuk membeli PGMP dari pasar lokal terdapat di Provinsi Papua (Rp. 1.689.534) sedangkan yang termurah terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan (Rp. 1.023.655).
3. Berdasarkan data pengeluaran bulanan untuk makanan dari SUSENAS Maret 2016, secara nasional terdapat 62% penduduk yang dapat menjangkau PGMP. Daya beli terhadap PGMP tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan dimana 76% penduduk dapat membeli PGMP; dan terendah terdapat di NTT dimana hanya 32% yang mampu membeli PGMP.
4. Ketersediaan bahan makanan tidak merupakan hambatan utama bagi rumah tangga untuk mengkonsumsi PGMP. Akses ekonomi terhadap makanan (daya beli) adalah salah satu hambatan utama dan hambatan lainnya dapat berupa pengetahuan tentang jenis bahan makanan yang menjadi sumber gizi dan pilihan terhadap makanan atau minuman yang kurang bergizi, lebih mahal dan atau lebih sesuai selera.
5. Paket makanan yang direkomendasikan untuk program BNPT adalah beras, telur dan sayuran hijau (disebut Paket Bergizi). Dengan voucher senilai Rp. 110.000 per bulan Paket Bergizi ini mempunyai dampak gizi terbesar dibandingkan dengan paket yang disediakan saat ini seperti beras bersubsidi Rastra, paket BPNT berupa beras dan gula maupun paket berupa beras dan telur. Paket beras dan gula sangat **tidak direkomendasikan** digunakan karena paket ini memberikan dampak gizi yang sangat

---

<sup>1</sup> Ini adalah diet termurah yang memenuhi kebutuhan energi, protein, lemak, 9 vitamin dan 4 mineral. Diet ini juga meliputi makanan pokok, dalam hal ini di Indonesia adalah beras. Diet ini juga mengasumsikan bahwa anak usia 12-23 bulan menerima ASI dalam porsi per hari seperti yang rekomendasikan.

kecil karena kandungan zat gizi yang rendah dari dua bahan makanan tersebut. Selanjutnya, dengan meningkatnya persentase berat badan lebih (*overweight*) dan obesitas di Indonesia, yaitu terdapat 12% anak di bawah 5 tahun yang mengalami *overweight*<sup>2</sup> dan masing-masing 25% orang dewasa yang *overweight* dan 6% mengalami obesitas<sup>3</sup>, maka paket berupa beras dan gula dapat berkontribusi memperburuk masalah gizi tersebut<sup>4</sup>.

6. Jika nilai voucher dinaikkan sebesar 50% (menjadi Rp. 165.000), maka direkomendasikan untuk menyertakan makanan pendamping fortifikasi sebanyak 20 gram/hari ke dalam Paket Bergizi untuk anak usia 6-23 bulan. Jika nilai voucher dinaikkan sebesar 100% (menjadi Rp. 220.000), maka direkomendasikan Paket Bergizi menyertakan makanan pendamping fortifikasi dan rumah tangga dapat menggunakan sisa uang pada voucher tersebut untuk membeli bahan makanan bergizi lain sesuai pilihan.
7. Perbedaan harga makanan antar provinsi yang dimasukkan dalam paket Rastra, BPNT maupun Paket Bergizi, berdampak pada kemampuan rumah tangga untuk membeli sesuai dengan jumlah makanan yang diperlukan untuk memberikan dampak gizi sebagaimana pada analisa tingkat nasional. Hal ini khususnya terjadi di Provinsi Papua, Maluku dan NTT, yaitu provinsi-provinsi dengan harga bahan makanan bergizi jauh lebih mahal.
8. Demi mencapai kesetaraan dan dampak gizi, WFP merekomendasikan bahan makanan yang dapat dibeli oleh masyarakat dengan jumlah yang sama untuk semua provinsi tanpa mempertimbangkan tempat tinggal penerima pemanfaat BPNT. Dengan demikian, nilai dari voucher perlu disesuaikan dengan harga bahan-bahan makanan tersebut di tingkat provinsi. Di beberapa provinsi (misalnya Jawa Barat dan Jawa Timur) nilai voucher akan lebih rendah; di provinsi lain (misalnya Papua dan NTT) akan lebih tinggi. WFP juga merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengkaji mekanisme-mekanisme tertentu untuk memastikan fluktuasi harga bahan makanan tidak menurunkan jumlah makanan yang dapat dibeli dengan voucher tersebut.

---

<sup>2</sup> UNICEF, World Health Organization, World Bank. UNICEF-WHO-World Bank: 2014 Joint Child Malnutrition Estimates: Levels and Trends (July 2015 update, except for India, which is September 2015 update)

<sup>3</sup> World Health Organization Global Health Observatory Data Repository 2015. Available from <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A897A?lang=en> (accessed April 20, 2015).

<sup>4</sup> Shrimpton R. and C. Rokx, (2013) The Double Burden of Malnutrition in Indonesia, World Bank Jakarta, Report 76192-ID